


Penguatan Kesadaran Politik Warga Kelompok Tani Terpadu Martubung Kecamatan Medan Labuhan Menghadapi Pemilu 2024

¹⁾Jhonson Pasaribu, ²⁾Silvia Decmerry Natalia Gea, ³⁾Rifka Febriani Hutasoit, ⁴⁾Angela Novenita Lumbantobing

¹Dosen Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Universitas HKBP Nommensen Medan
^{2,3,4)}Mahasiswa Prodi Adminitrasi Publik Fisipol, Universitas HKBP Nommensen Medan
Email Korespondensi: jhonsonpasaribu@uhn.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Kesadaran Partisipasi politik pemilu	Keberhasilan pemilu 2024 sangatlah tergantung sejauh mana jumlah keterlibatan masyarakat dalam memberikan partisipasinya. Sebelum memberikan partitipasi dengan baik alangkah pentingnya dilakukan sosialisasi lebih dahulu mengenai apa makna dan tujuan pemilu 2024 yang sesungguhnya. Pemilu sebagai proses politik dan model dalam memilih pemimpin harus sesuai dengan politik yang etis dan bermoral. Untuk itulah, keadsaran semua warga negara dalam mmeberikan hak politiknya adalah sebuah keharusan kalau kita ingin menjadikan pemilu 2024 adalah pemilu yang bermutu secara proses dan secara substansialnya. Kelompk Tani Terpadu MARTubung Kecamatan Medan Labuhan sebagai salah satu kelompok tani yang punya hak politik harus mampu mendorong dan menjadi pelaku utama partisipasi politik yang rasional. Melalui salah satu tridarma pendidikan tinggi sangat diharapkan kesadaran warga negara bisa meningkat dengan baik melalui penyuluhan politik dan pendidikan politik ini.
Keywords: Awareness Political participation election	ABSTRACT The success of the 2024 election really depends on the extent of community involvement in providing their participation. Before giving proper participation, how important it is to socialize in advance about what the true meaning and purpose of the 2024 election is. Elections as a political process and model for selecting leaders must be in accordance with ethical and moral politics. For this reason, the awareness of all citizens in giving up their political rights is a must if we want to make the 2024 election a quality election in terms of process and substance. The Martubung Integrated Farmers Group, Medan Labuhan District, as one of the farmer groups that have political rights, must be able to encourage and become the main actors for rational political participation. Through one of the tridharma of higher education, it is hoped that citizen awareness can increase properly through political counseling and political education.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kesadaran warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan, apalagi kelompok masyarakat yang punya perkumpulan seperti kelompok Tani seperti Kelompok Tani Terpadu Martubung Kecamatan Medan Labuhan sangat kita harapkan bisa memberikan apa yang menjadi hak suaranya agar keterlibatan warga semakin bagus dan baik. Para kontestan yang akan bertarung di pemilu 2024 ini akan memperebutakn suara rakyat karena parpollah yang punya kewenangan dalam menetapkan calginya di pemilu 2024 nanti.

Partai politik (parpol) salah satu mesin utama penggerak sistem demokrasi (Juan J Linz dan Alfred Sthepan: 1996). Tanpa mesin, sebuah kendaraan atau mobil tidak akan bisa jalan, sekalipun mesin harus ditopang oleh kompen yang lain. Partai politik sebagai mesin penggerak utama demokrasi kita sedang diperhadapkan pada sebuah kerusakan. Parpol kehilangan keparpolannya karena berbagai persoalan,

termasuk melembaganya ideologi pragmatisme (terseret korupsi) dengan meninggalkan kepentingan rakyat (publik) dalam perjuangan parpol. Akankah pemilu 2024 hanya sebagai ajang kepura-puraan bagi parpol? Atau upaya parpol membangun jaringan untuk memperlebar kekuasaan demi tercapainya ambisi mereka atas nama rakyat?

Sebelum dan sesudahnya, well come sepuluh partai politik di pentas pemilu 2024, itulah yang akan kita ucapkan pasca pengumuman kontestan pemilu 2024, itulah yang akan kita ucapkan pasca pengumuman kontestan pemilu 2024. Secara legal formal setelah KPU melakukan verifikasi faktual yang terakhir akhirnya KPU sampai pada sebuah keputusan bahwa kontestan pemilu adalah 17 partai politik. Bagi yang tidak lolos verifikasi harus menerima keputusan dengan legowo. Terlepas dari kelemahan KPU dalam melakukan verifikasi faktual. Inilah realitas demokrasi kita yang harus kita terima. Saatnya semua komponen anak bangsa ini untuk menerima budaya kalah untuk menang di kemudian hari. Jangan langsung menuduh yang bukan-bukan. Kecewa boleh saja tetapi tetap dalam koridor membangun demokrasi yang bersemi di negeri ini.

Pasca lolosnya 17 parpol ini, apa harapan masyarakat kita kepada 17 partai politik ini dalam menghadapi pemilu 2024? Apakah parpol kembali berlanjut dengan tradisi ideologi pragmatismenya? Dimana mereka hanya memperjuangkan kekuasaan dan memperkaya diri dengan kekuasaan yang mereka miliki? Seperti yang kita lihat dewasa ini parpol tidak menjalankan fungsi keutamannya sehingga konsolidasi demokrasi macet dan tidak jalan. Akibatnya masyarakat pun apatis dalam melihat demokrasi di negara kita. Padahal demokrasi adalah alat (*tools*) dalam mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 inilah sangat kita harapkan partisipasi politik warga negara, dalam hal ini Kelompok Tani Terpadu Martubung agar mereka punya kesadaran dimana mereka ikut memberikan suaranya.

Adapun tujuan dari penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman yang baik bagi kelompok Tani Martubung agar mereka bisa memahami dengan baik apa itu pemilu 2024. Meningkatkan partisipasi politik warga Kelompok Tani Terpadu Martubung dalam menghadapi pemilu 2024. Mencegah terjadinya penyimpangan pemilu di pemilu 2024.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2005), partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Dikutip dari buku Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (2016) karya Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, partisipasi politik bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif. Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik.

Melansir dari jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (2014) karya Tia Subekti, kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak, memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara.



Gambar 1. Foto Bersama

Budaya Politik Kaula (Subyek) Dalam jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar (2020) karya Ni Ketut Arniti, partisipasi politik merupakan contoh perwujudan negara demokrasi, yang mana masyarakat berperan untuk memilih pejabat negara dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat yaitu: Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah, supaya dapat diperbaiki. Sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.



Gambar 2. Foto Bersama

Faktor partisipasi politik Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015) karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, partisipasi politik memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh, yaitu: Faktor psikologis Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik. Faktor ekonomi atau rasional Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. Faktor sosiologis Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan. Baca juga: Sosialisasi Politik: Pengertian, Fungsi, Jenis, Agen, dan Contohnya Bentuk partisipasi politik Partisipasi politik memiliki banyak bentuk atau jenis.

Namun, setidaknya ada tiga bentuk umum dari partisipasi politik. Berikut penjelasannya: Partisipasi aktif Adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam

2656

pemilihan kepala daerah. Partisipasi pasif Adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah.



Gambar 3. Foto Kegiatan

Artinya masyarakat hanya sekadar menerima dan mengikuti saja, tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik. Selain dua jenis tersebut, partisipasi politik juga dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yakni: *Apatis*: artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik. *Spectator*: artinya masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. *Gladiator*: artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Baca juga: Kebijakan Politik Masa Pemerintahan B. J. Habibie Partisipasi politik juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: Partisipasi politik secara konvensional Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan lain sebagainya. Partisipasi politik secara non konvensional Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara demonstrasi, mogok, serta pembangkangan tanpa disertai kekerasan.

III. KESIMPULAN

Munculnya kesadaran warga Kelompok Tani Terpadu Martubung adalah hal yang harus kita dorong agar mereka kedepan bisa memberikan haknya pada pemilu 2024 sehingga proses pemilu kita bisa berjalan dengan baik, dan inilah yang kita harapkan. Legitimasi pemilu itu sangat tergantung kepada partisipasi dan keadaran warga negara.

Kementerian Perdagangan. 2014. Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Surati dan Ichwani. . "Pengaruh Persepsi Peserta Didik mengenai Media Sosial terhadap Sikap Toleransi". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan(Jurnal Online). Vol. 5 No. 1 Hal.85-96
- Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Anggara, Sahaya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung:Pustaka Setia.